

Ikut Bantu Penanganan Corona BIN Dianggap Sudah Tepat

PENGAMAT Intelijen, Susaningtyas NH Kertopati menilai sudah tepat Badan Intelijen Negara (BIN) terlibat membantu negara dalam penanganan pandemi Covid-19. Dijelaskannya, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yakni pasal 30 huruf d memberikan kewenangan kepada BIN untuk membentuk membentuk satuan tugas dalam pelaksanaan aktivitas intelijen menghadapi pandemi ini.

"Ancaman kesehatan juga merupakan bagian dari ancaman terhadap keamanan manusia yang merupakan ranah kerja BIN. Dengan dasar tersebut, BIN turut berpartisipasi secara aktif membantu Satgas Penanganan Covid-19 dengan melakukan operasi *Medical Intelligence* (Intelijen Medis), di antaranya berupa gelaran tes swab di berbagai wilayah, dekontaminasi, dan kerja sama dalam pengembangan obat dan vaksin," katanya.

Nuning - sapaan akrab Susaningtyas, menuturkan bahwa operasi Intelijen Medis ini, bukan cuma dilakukan BIN. Sebab di negara-negara lain seperti Amerika Serikat juga memiliki *National Center for Medical Intelligence* (NCMI) yang melakukan *surveillance* penyakit menular di dunia, atau NATO di Eropa yang melibatkan aktivitas intelijen dalam pengkajian infrastruktur kesehatan. Hasilnya pun cukup signifikan dalam membantu pemerintah mengatasi pandemi ini.

"Kehadiran Satgas BIN telah mendapat apresiasi positif dari kementerian/lembaga (K/L) dan Pemda yang menyampaikan permohonan kepada BIN untuk membantu pelaksanaan *tracing* di wilayah/institusinya dengan melakukan tes swab dengan beban anggaran operasi BIN," jelas Nuning.

Upaya-upaya yang dilakukan BIN, sambung Nuning,

semata-mata untuk membantu pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19. Di antaranya melalui 3T (*testing, tracing, dan treatment*) serta memperbanyak kapasitas testing di Indonesia yang saat ini masih di bawah rata-rata tes harian yang ditetapkan WHO (1.000 tes per 1 juta penduduk). BIN juga bekerjasama dengan banyak pihak dalam operasi ini.

"BIN bekerja sama dengan berbagai lembaga penelitian dan universitas yang memiliki fasilitas laboratorium BSL 2 dan 3 di berbagai daerah, utamanya yang masuk dalam zona merah Covid-19, untuk meningkatkan kapasitas uji spesimen dengan memberikan berbagai bantuan alat laboratorium, mulai dari RT-PCR hingga berbagai peralatan lainnya, seperti *reagen* dan sebagainya.

Selain itu, BIN juga membangun satu *lab stasioner* berstandar BSL-2+ dan empat unit *lab mobile* berstandar BSL-2 untuk membantu mempercepat dan memperbanyak kapasitas *testing*, yang mampu menjangkau zona-zona merah yang sebelumnya tidak dapat dijangkau," jelasnya.

Upaya 3T ini dimaksudkan untuk mencegah OTG/asimtomatik agar tidak menjadi *spreader* merupakan perhatian semua pihak dan mengobati pasien Covid-19 kondisi ringan dan sedang yang dideteksi sejak dini dari tes swab berpeluang sembuh lebih besar serta lebih murah.

"Jangan sampai stigmatisasi masyarakat yang kuat melekat menjadi bagian dari polemik hasil tes positif-negatif. Sebagai lini terdepan dalam keamanan nasional sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, maka BIN berkewajiban membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia," jelasnya. ■ KAL



KEPALKAN TANGAN: Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Fauzie Yusuf Hasibuan (kanan), Sekjen PERADI Thomas Tampubolon (kiri) dan Ketua Dewan Pembina PERADI Otto Hasibuan foto bersama saat pembukaan Musyawarah Nasional III PERADI 2020 di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemarin. Musyawarah Nasional PERADI dilakukan secara virtual tersebut beragenda memilih ketua umum baru periode 2020-2025.

Gara-gara Pupuk Langka

Awas, Petani Geruduk Senayan

Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan mengingatkan pemerintah untuk tidak main-main dengan kesabaran petani yang saat ini kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Jangan sampai, gara-gara pupuk, petani beramai-ramai geruduk Senayan.

MENURUT Johan, saat ini pemerintah menganggap seakan-akan persoalan pupuk telah selesai. Tapi faktanya, pupuk saat ini sudah langka. Banyak petani sudah mulai mikir-mikir menunda musim tanam lantaran sama sekali tidak mendapatkan pupuk.

"Apalagi di daerah pemilihan saya yang minim irigasi. Kami hanya andalkan rahmat dari Allah dengan datangnya hujan. Hari ini petani-petani di Sumbawa sedang memperbaiki pagarnya untuk persiapan tanam,

tapi belum berani membajak karena persoalan pupuk," kata politisi PKS daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

Pemerintah, kata dia, telah menerapkan kebijakan Kartu Tani sebagai alat untuk menebus pupuk subsidi. Pemerintah telah mencetak sebanyak 4 juta Kartu Tani untuk disebar ke kalangan petani yang berhak berdasarkan kebutuhan.

Dari total kartu tersebut yang telah disalurkan ke petani telah mencapai 55 persen. Sayangnya,

yang telah digunakan ke petani baru mencapai 13 persen. "Apa persoalannya? Berarti ada persoalan di data," katanya.

Menurut dia, rendahnya penggunaan Kartu Tani ini sangat fatal karena sama saja menunjukkan bahwa petani kesulitan mengakses pupuk bersubsidi. Dia pun meminta agar sebelum kebijakan ini diterapkan, pemerintah sebaiknya membuat *pilot project*.

"Saran saya, jangan sampai batas kesabaran petani ini tidak bisa kita bendung seperti buruh yang akan mengepung Senayan ini. Karena kalau ada satu pihak mau gunakan petani ini, habis Indonesia. Jangan main-main dengan pupuk. Pupuk ini kebutuhan dasar petani," *warning* Johan.

Hal senada dilontarkan Wakil

Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi. Dia mengatakan, pada dasarnya cara berpikir petani sangat sederhana dan tidak berbelit-belit agar bisa menerima pupuk subsidi.

Distribusi pupuk subsidi ini cukup diatur melalui *data base* kependudukan yang telah tertata secara administrasi melalui kartu identitas atau KTP.

"Jadi tinggal diblok saja mana penerima pupuk subsidi dengan petani luas areal berapa. Jadi, data ini bisa diturunkan ke tingkat distributor, pengecer, bahwa dengan KTP orang bisa beli pupuk," katanya.

Sayangnya, kata dia, cara berpikir petani ini tidak ditangkap dengan baik oleh para pengambil kebijakan. Yang terjadi malah dibikin rumit.

"Saya ini orang bodoh, tidak

mengerti perbankan, asli wong desa, bisa hidup dari jual tani, sederhana. Tapi orang-orang pintar ini dari hal sederhana malah dibuat jadi sangat hebat yang pada akhirnya ribet kabeh," katanya.

Akhirnya yang terjadi, kata dia, petani cuma bisa pasrah. Setiap kali pupuk langka, mereka diam. Begitu juga ketika harga panen anjlok, mereka juga diam. Itu karena para petani adalah kelompok yang tidak terorganisir.

"Pupuk tidak ada, diam. Harga (panen) murah, diam. Tiap tahun tidak dapat perhatian serius dari pemerintah, diam. Orang-orang ikhlas. Tapi yakinlah ketika orang-orang ikhlas ini dibiarkan terus-menerus, kita akan roboh oleh mereka," *warning* Dedi. ■ KAL

Partai Ganti Pengurus Fraksi PKS Tetap Kritis

ANGGOTA Komisi III DPR yang juga Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsyi menegakkan, pihaknya akan tetap kritis ke pemerintah walaupun terjadi pergantian pengurus untuk lima tahun mendatang. PKS tetap akan menjadi kekuatan penyeimbang baik di parlemen maupun di masyarakat.

"Sebagai Sekjen terpilih tentunya saya bertugas menggerakkan roda organisasi. Melanjutkan kerja PKS berkhidmat untuk umat. Tentunya, PKS ke depan akan terus bersama rakyat dalam berbagai situasi," katanya di Jakarta, kemarin.

Aboe mengatakan, garis kebijakan partai masih tetap konsisten. PKS mengambil posisi sebagai oposisi yang bermartabat. Sehingga akan terus menjalankan fungsi penyeimbang



Aboebakar Alhabsyi

agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan baik.

"Suatu keniscayaan, dalam sebuah negara demokrasi dibutuhkan kekuatan penyeimbang. Karenanya, peran ini akan diambil oleh PKS," tegasnya.

Ketua Mahkamah Kehormatan DPR ini berharap, pemerintahan sekarang amanah menjalankan roda pemerintah dengan membuat kebijakan-kebijakan pro rakyat. "Termasuk mengusulkan undang-undang juga harus dengar aspirasi rakyat," ingatnya.

Sebelumnya, PKS mengumumkan susunan kepengurusan partai politik periode 2020-2025. Susunan pengurus baru itu diputuskan melalui sidang Musyawarah Majelis Syuro PKS di Bandung, Senin (5/10). Ahmad Syaikhul terpilih sebagai Presiden PKS menggantikan Sohibul Imam. Sementara Aboebakar Alhabsyi ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan Mustafa Kamal.

"Mohon doa dan dukungan dari semua pihak. Tentunya kami akan melanjutkan penyusunan struktur partai dan konsolidasi internal," pungkas Aboe. ■ KAL

Pilkada Tidak Ditunda Jangan Salah Pilih Pemimpin

WAKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Jazilul Fawaid berharap, masyarakat tidak salah dalam memilih pemimpin saat Pilkada Serentak 2020. Pilihlah pemimpin yang memberi kemaslahatan kepada rakyat.

Hal tersebut disampaikan Jazilul saat menyampaikan sosialisasi 4 Pilar MPR di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bantul, Yogyakarta, akhir pekan lalu.

Hadir mendampingi Anggota Komisi II DPR Sukamto, Anggota DPRD I Yogyakarta Umaruddin Masdar dan Wakil Bupati Bantul Halim Muslih. Ketua DPW PKB Yogyakarta Agus Sulistyono ikut hadir.

Dalam pidatonya, Jazilul mengatakan, pemerintah sepertinya tidak akan menunda lagi pilkada. Sebab, akan menghilangkan kepercayaan terhadap pemimpin politik.

Karena itu, masyarakat kudu menjalankan protokol kesehatan saat pencoblosan nanti. Bantul satu dari lima kabupaten/kota di Yogyakarta yang akan menggelar Pilkada Serentak pada 9

Desember 2020.

Wakil Ketua Umum PKB itu mengingatkan, pilkada langsung adalah proses demokrasi untuk memilih pemimpin. Memang prosesnya mahal dan mendatangkan efek samping yang buruk seperti politik uang, fitnah, sampai hoaks.

Namun, dia meminta masyarakat memanfaatkan momen ini dengan baik. Jangan sampai salah dalam memilih calon pemimpin. Karena salah pilih akan menghasilkan kepala daerah yang tidak serius dalam bekerja.

"Karena kepala daerah yang tidak serius, tak akan memikirkan rakyatnya. Hanya berpikir untuk diri sendiri. Dan itu pasti akan mendatangkan masalah," kata Jazilul.

Bagaimana menjadi pemimpin yang cerdas? Dia bilang hubungan pemimpin dengan rakyat adalah berdasarkan kemaslahatan. Contohnya, apakah calon pemimpin yang dipilih bisa membawa kesejahteraan atau tidak.

"Tidak mudah memang. Karena syarat utama seorang

pemimpin itu adil. Kalau pemimpin tidak adil, saya yakin apa yang diharapkan rakyat tidak akan terealisasi," ujarnya.

Kepada para calon kepala daerah, Jazilul berpesan agar memahami empat pilar dan memasukkan dalam visi misi. Dia sering menemui ada calon kepala daerah (Cakada) yang tidak memasukkan hal tersebut lantaran dianggap sudah tuntas atau lupa.

Dia juga berpesan agar para calon tidak menghalalkan segala cara untuk menang. Berkampanye tidak boleh di luar Pancasila. Jangan menggunakan politik identitas yang sempit karena akan mendatangkan permusuhan dan konflik horizontal.

"Ini yang tidak boleh dilakukan para calon. Masyarakat harus dicerdaskan. Saya khawatir di dalam kondisi Covid ini malah terjadi pembodohan," ungkapnya.

Jazilul berpesan, jadikan pilkada untuk merajut persatuan. "Kompetisi iya, tapi ujungnya harus persatuan," pungkasnya. ■ BCG

Manfaat Undang-Undang Cipta Kerja Untuk Usaha Mikro dan Kecil

- 1 Perizinan Tunggal bagi UMK, cukup melalui pendaftaran.
- 2 Memberikan insentif dan kemudahan bagi Usaha Menengah dan Besar yang bermitra dengan UMK.
- 3 Insentif Fiskal dan Pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM.
- 4 Pemerintah memprioritaskan penggunaan DAK untuk mendanai kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM.
- 5 Pemberian fasilitasi layanan bantuan dan perlindungan hukum bagi UMK.
- 6 Prioritas produk/ jasa UMK dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Kemitraan UMK: Pemerintah, BUMN, BUMD wajib mengalokasikan penyediaan tempat promosi, tempat usaha atau pengembangan UMK pada infrastruktur publik (terminal, bandara, pelabuhan, stasiun, rest area jalan tol, dan infrastruktur publik lainnya).

Kemudahan untuk Koperasi: (a) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit 9 orang anggota; (b) Rapat Anggota Tahunan (RAT) dapat diwakilkan; (c) Buku daftar anggota berbentuk tertulis atau elektronik; (d) Koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

